

**EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU NELAYAN
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN NELAYAN
TRADISIONAL
DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Peguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh:
SUHARI YANTO
14042099**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGRI PADANG
2019**

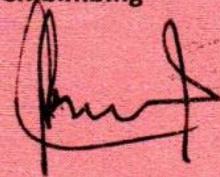
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Program Kartu Nelayan Dalam Rangka Pemberdayaan
Nelayan Tradisional Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
Nama : Suhari Yanto
TM/NIM : 2014/14042099
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
NIP. 196402081990032001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari kamis, 31 Januari 2019 pukul 13:00 s/d 14:00 WIB

Efektivitas Program Kartu Nelayan Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Nama : Suhari Yanto
TM/NIM : 2014/14042099
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2019

Tim Penguji:

Nama

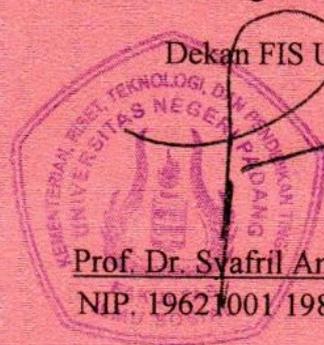
Ketua : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
Anggota : Nora Eka Putri S.IP. M.Si
Anggota : Zikri Alhadi S.IP., MA

Tanda Tangan

1.....
2.....
3.....

Mengetahui:

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suhari Yanto
TM/NIM : 2014/14042099
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bawa skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Program Kartu Nelayan Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang**” adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sembarinya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang 31 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Suhari yanto
2014/14042099

ABSTRAK

SUHARI YANTO
14042099/2014

**Efektivitas Pemanfaatan Kartu Nelayan Dalam
Rangka Pemberdayaan Nelayan Tradisional Di
Kecamatan Koto Tengah Kota Padang**

Sebagai negara Kepulauan, Indonesia masih mempunyai permasalahan dengan kehidupan nelayan. Nelayan dan masyarakat pesisir telah lama terabaikan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan. Dalam pelaksanaannya nelayan masih belum paham mengenai pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang menggambarkan latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Informan penelitiannya sebanyak 13 orang. Teknik pengumpulan data meliputi : Observasi, interview (wawancara), dan studi dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini instrument utama penelitian dibantu dengan pedoman wawancara dan panduan observasi. Untuk menganalisis data penelitian, peneliti mengelola, mencari dan di urutkan dan diorganisasikan dalam kategori atau pokok-pokok bahasan kemudian selanjutnya diusulkan dan diuraikan sedemikian rupa setelah itu dikaitkan dengan teori yang ada. Teknis keabsahan data dalam penelitian ini melalui Ketekunan pengamat dan triangulasi metode. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemanfaatan dari pemberian kartu nelayan belum efektif.

Kata Kunci: Pemanfaatan , Kartu Nelayan, Pemberdayaan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pemberin Kartu Nelayan Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis mohonkan kepada Allah SWT agar disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi sekalian alam terutama ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi semua umat manusia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Padang. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak motivasi baik secara moral maupun materi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat,

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku dekan fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Ibu Nora Eka Putri, S.IP , M.Si selaku penguji I dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP. MA selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini
5. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Administrasi Publik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial yang telah mendukung dan memfasilitasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Andri selaku Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.
7. Ibu Dian selaku pegawai Asuransi Jasa Raharja dan Ibu Reni selaku Pegawai bank.
8. Bapak Risky selaku salah satu Ketua KUB di Kecamatan Koto Tengah.

9. Masyarakat nelayan Kecamatan Koto Tengah, Bapak Aa, Bapak Safril, Bapak Ipis, Bapak Aemen, Bapak An, Bapak Syahroni, Bapak Ijal, Bapak Rano, Ibu Lina.
10. Teristimewa untuk orang tua penulis Bapak Suparso.s dan Ibu Susanti yang telah memberikan doa, dorongan materi dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi.
11. Rekan-rekan jurusan Administrasi Publik angkatan 2014, terimakasih atas segala kontribusinya.
12. Berbagai pihak yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Padang, 31 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. RumusanMasalah.....	10
E. TujuanPenelitian	10
F. ManfaatPenelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Teori dan Indikator Efektivitas	12
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	15
a. Teori Pemberdayaan Masyarakat	18
3. Kriteria Nelayan	23
4. Kartu Nelayan	25
B. Studi Penelitian yang Relevan	30
C. Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	44
F. Uji Keabsahan Data	44

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Temuan Umum	46
1. Jenis-jenis Nelayan di Kecamatan Koto Tengah	46
a. Pengusaha	46
b. Tradisional	47
c. Buruh	49
2. Tingkat Pendidikan Nelayan	49
3. Kelompok Nelayan	50
4. Keterkaitan Nelayan Tradisional di Kecamatan Koto Tengah Dengan DKP Kota Padang	53
B. Temuan Khusus	54
1. Efektifitas pemantauan kartu nelayan dalam pemberdayaan Nelayan tradisional sudah efektif di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang	55
a. Ketepatan sasaran program	55
b. Sosialisasi proram	59
c. Tujuan program	69
d. Pemantauan program	72
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian kartu nelayan untuk memberdayakan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang	74
3. Solusi untuk mengatasi kendala dalam pemanfaatan kartu nelayan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang	77
C. Pembahasan	79
1. Pemanfaatan kartu Nelayan dalam pemberdayaan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang	79
a. Ketepatan sasaran program	79
b. Sosialisasi program	81
c. Tujuan program	83
d. Pemantauan program	84

2. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan kartu nelayan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang	85
3. Solusi untuk mengatasi kendala dalam pemanfaatan kartu nelayan bagi nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan.....	42
2. Tingkat pendidikan	50
3. Kelompok KUB	50
4. Kelompok POKLAHSAR.....	51
5. Kelompok POKDAKAN	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	40
2. Kartu Nelayan tampak depan dan belakang.....	63
3. Formulir Permohonan Penerbitan Kartu Nelayan.....	66
4. Formulir Permohonan Perubahan Kartu Nelayan.....	67
5. Formulir Permohonan Perpanjangan Kartu Nelayan.....	68
6. Kartu Asuransi	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Foto Dokumentasi Lapangan	97
2. Pedoman Wawancara.....	99
3. Surat Keterangan Izin Pengambilan Data Awal dari Kesbangpol	101
4. Surat Keterangan Penyelesaian Skripsi dari Kesbangpol	102

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki potensi sumber daya kelautan yang di perhitungkan di dunia. Jumlah pulau mencapai 17.508 pulau besar dan kecil, memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas kawasan laut 3,1 juta km² (tidak termasuk luas laut Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE).

Potensi laut yang besar sangat ironis dengan kondisi memprihatinkan di perkampungan nelayan, antara lain adalah rumah-rumah nelayan yang sangat sederhana dengan dinding dan lantai papan yang terletak di bibir pantai yang masih terpengaruh oleh pasang surut air laut, di tambah lagi dengan pencemaran sampah dan limbah baik berasal dari rumah tangga maupun dari pabrik yang mengotori pantai.

Nelayan dan masyarakat pesisir telah lama terabaikan di Indonesia. Selama 32 tahun orde baru berkuasa peraturan tentang perikanan hanyalah bagian kecil dari kebijakan pertanian. Kebijakan pembangunan di sektor perikanan dijalankan secara *top-down*, dan relatif tidak ada kebijakan yang berpihak pada nelayan tradisional. Akibatnya nelayan kecil atau nelayan tradisional sering tidak mendapatkan perlindungan. Di sisi lain kemampuan nelayan tradisional dalam usaha peikanan masih terbatas baik karena tak memiliki modal maupun karena alat tangkap yang mereka gunakan masih relatif tradisional.

Seiring dengan reformasi dan pergantian pemerintahan berdampak pada perhatian sektor kelautan dan perikanan. Guna mengatasi ploblem

nelayan yang begitu kompleks sejak April 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan. Yang dimaksud dengan kartu nelayan adalah kartu identitas dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan (pasal 1 No.16/PERMEN-KP/2016).

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri No.16/PERMEN-KP/2016 pada BAB V tentang persyaratan dan tata cara penerbitan kartu nelayan bagian kesatu pasal 8 (ayat 1) yaitu: Setiap nelayan untuk memiliki kartu nelayan harus mengajukan permohonan kepada dinas kabupaten/kota sesuai dengan domisili dengan melampirkan persyaratan.(a) Formulir permohonan penerbitan kartu nelayan yang telah di isi, (b) Foto kopi KTP, (c) Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkerja sebagai nelayan, dan (d) Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Dalam waktu pengurusan kartu nelayan seperti yang dijelaskan oleh bapak Riski selaku ketua KUB yang mengatakan bahwa waktu pengurusan dari kartu nelayan itu tergantung siapa yang menguruskan dan seberapa seringnya kita menanyakan ke instansi terkait, hal tersebut yang menyebabkan masih adanya beberapa nelayan yang belum memiliki kartu nelayan sampai sekarang.

Dijelaskan pada BAB II Pasal 3 (ayat 2) tentang fungsi kartu nelayan yaitu: (a) Identitas profesi nelayan, (b) Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, (c) Memberikan kemudahan dalam

pembinaan nelayan, dan (d) Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program kementerian.

Dalam penerbitan kartu nelayan ini mempunyai fungsi dan manfaat lebih yakni mempermudah nelayan mengikuti dan menerima program yang telah dibuat pemerintah. Misalnya akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, akses untuk mendapat jaminan kesehatan, referensi sertifikat hak atas tanah, asuransi jiwa dari kecelakaan di laut, identitas profesi nelayan, basis data untuk mempermudah perlindungan dan pemberdayaan nelayan, memberi kemudahan dalam pembinaan nelayan, memberi kemudahan dalam pelaksanaan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (pasal 3 PERMEN-KP/No 16-KP/2016).

Kegunaan Kartu Nelayan yang sudah dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia diantaranya yaitu; bukti identitas profesi nelayan diwilayah Negara kesatuan republik Indonesia. sebagai database daerah dan Nasional perkembangan kapasitas nelayan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republic Indonesia (WPPNRI) guna pengendalian sumberdaya ikan dan penyediaan lapangan kerja nelayan secara rasional berkelanjutan, pemebelian BBM bersubsidi dari pertamina, referensi pembuatan jamkesda telah dilaksanakan, tepat sasaran Penerima PUMP (program usaha mina perdesaan) perikanan tangkap, penerima SEHAT (sertifikat hak atas tanah nelayan), pelaporan keselamatan kerja nelayan dan informasi cuaca melalui SMS Gateway, mendapat program bimbingan teknis perikanantangkap, asuransi Jamsostek nelayan, bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ketika musim gelombang tinggi tidak bisa melaut.

Dalam hasil wawancara dengan bapak Al pegawai BBM Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) yang menjelaskan mengenai keberadaan dari SPDN tersebut adalah dikhususkan hanya untuk nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, agar masyarakat tidak bersusah paya mengantri di SPBU dalam pembelian bahan bakar di SPDN tersebut tidak harus menggunakan kartu nelayan, tetapi menggunakan surat pengantar dari kelompok nelayan tersebut, namun apabila pembelian bahan bakar dilakukan di SPBU pada umumnya maka harus menunjukkan kartu nelayan, SPDN tersebut hanya mempunyai 80 ton minyak saja, apabila minyak di SPDN sudah habis maka para nelayan harus membeli minyak ke SPBU.

Untuk mendaftar menjadi peserta dari Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) dan Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) khusus untuk masyarakat nelayan harus melampirkan Kartu Nelayan sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut adalah seorang nelayan, dan dalam pengurusan asuransi yang harus melampirkan kartu nelayan sebagai syarat utama juga memerlukan syarat merupakan nelayan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah. Sejak digulirkan, KKP telah menerbitkan 409.800 (Maret 2017) polis asuransi nelayan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia

Di tahun 2017, KKP menargetkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan bagi 500.000 jiwa. Dengan nilai manfaat per orang berupa santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp.200.000.000

apabila menyebabkan kematian, Rp.100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan Rp.20.000.000 untuk biaya pengobatan. Sementara untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat perorang sejumlah Rp. 160.000.000 apabila menyebabkan kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), Rp.100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp.20.000.000. dikutip dari sumber (<https://kkp.go.id/artikel/2627-daftar-penerima-bantuan-premi-asuransi-nelayan-tahun-2017>)

Adapun Program Mina Usaha Pedesaan (PUMN) yang ditujukan kepada masyarakat nelayan yang sudah terbentuk dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk terus berkembang dan menumbuhkan kewirausahaan dan mengajukan program bantuan berupa alat tangkap dan bantuan keperluan nelayan, dalam hal ini KUB di Kelurahan Koto Nan Tigo sudah mengajukan permohonan kepada DKP mengenai alat tangkap dan sudah mendapatkan bantuan tersebut, dalam pengajuan program bantuan tersebut harus mencantumkan nama kelompok serta nama keseluruhan anggota dan melampirkan kartu nelayan.

Saat melakukan pendaftaran kepemilikan kartu nelayan diharuskan mencantumkan nomor telepon untuk mendapatkan layanan Sms Gateway yang memberi keterangan mengenai perkiraan cuaca dari BMKG sebagai salah satu informasi kesiagaan nelayan dalam melaut, namun dalam hal tersebut tidak semua masyarakat nelayan yang mempunyai kartu nelayan mendapat informasi Sms Gateway tersebut hal tersebut disampaikan oleh bapak Riski

bahwa yang mendapat informasi Sms Gateway adalah ketua kelompok, sehingga ketua kelompok memberi informasi kepada anggota nelayan lainnya.

Selanjutnya adalah kepengurusan sertifikat tanah secara gratis yang diprogramkan untuk masyarakat nelayan yang dilakukan oleh kementerian ART/BPN berkerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan keputusan bersama Nomor 04/MEN-KP/KB/XI/2017 dan Nomor 7-SKB-BPNRI-2017 tanggal 15 November 2007 yang tujuannya untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hak berupa sertifikasi tanah kepada nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil. Untuk memiliki sertifikat tanah gratis tersebut harus menunjukkan bukti pemilik tanah dalam bentuk surat jual beli, surat hibah.

Adapun kriteria nelayan kecil yang berhak mengajukan sertifikat tanah gratis yaitu; (a) perorangan, (b) warga negara Indonesia, (c) memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili tetap, (d) pekerjaan utama sebagai nelayan atau menjalankan usaha penangkapan ikan skala kecil, (e) memiliki tanah pertanian atau non pertanian yang belum bersertifikat, (f) bukti kepemilikan, (g) memberi keterangan tertulis di atas materai tentang riwayat perolehan tanah, (h) bersedia menunjukkan batas-batas tanah, (i) berdomisili di Kecamatan atau berbatasan dengan tanah pertanian yang akan disertifikatkan, (j) sanggup membayar biaya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan uang pemasukan kepada negara, serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

Program bimbingan teknis penangkapan ikan adalah salah satu program pemerintah untuk melatih para nelayan dalam pembinaan menuju

nelayan yang baik, guna memberi pengetahuan proses penangkapan ikan agar kelestarian ikan tetap terjaga dan nelayan tetap bisa mencari ikan, dari keberadaan program tersebut diharapkan merubah pola pikir masyarakat nelayan yang tradisional ke tradisional yang lebih baik lagi.

Keuntungan memiliki kartu nelayan selanjutnya adalah untuk mendapatkan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk masyarakat nelayan yang tidak bisa melaut dikarenakan cuaca buruk yang terjadi berkepanjangan yang menyebabkan masyarakat nelayan tidak bisa melaut, dan program tersebut ditujukan kepada nelayan yang memiliki kartu nelayan sebagai bukti tepat sasaran kepada nelayan.

Sedangkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan keberadaan Kartu Nelayan dapat menjadi instrumen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kementrian/Lembaga Pemerintah saat memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Selama ini pemerintah masih kesulitan dalam menentukan kategori nelayan miskin/lemah termarginalisasi butuh perhatian yang sangat serius, sehingga perlu melakukan treatment agar bantuan terhadap nelayan dapat dijangkau dan lebih fokus tepat sasaran.

Dari penjelasan berbagai macam kelebihan dari kepemilikan kartu nelayan tersebut yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan kenyataanya tidak sesuai dengan tujuan awal dari diadakanya program kartu nelayan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang kurang memahami maksud dari kartu nelayan tersebut, seperti kegunaan di lakukan kepengurusan sertifikat tanah gratis adalah untuk menjadi anggunan

masyarakat meminjam ke Benk untuk membuat usaha nelayan tersebut, namun kenyataanya masyarakat takut meminjam ke Benk dikarenakan takut akan tidak bisa membayar angsuran di Benk tersebut.

Dari awal keluarnya Peraturan Menteri No.16/PERMEN-KP/2016 pada April 2016 dan terlaksanakan di Kota Padang pada bulan Mei 2016 langsung melakukan sosialisasi mengenai kartu nelayan, dari data yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang terkhusus di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang melalui dari jumlah masyarakat yang terdaftar di data nelayan penerima asuransi yaitu pada tahun 2016 berjumlah 216 nelayan yang sudah terdaftar dan di tahun 2017 meningkat menjadi 564 nelayan. Berarti sampai tahun 2017 masih terdapat 348 nelayan yang belum memiliki kartu nelayan. Alasan utama yang dikemukakan adalah karena belum sempat atau belum ada waktu untuk membuat kartu nelayan tersebut karena para nelayan yang belum mempunyai kartu nelayan tersebut masih sibuk dengan kesibukan melaut.

Adapun hal lain yang menjadi permasalahan bagi masyarakat nelayan tersebut adalah adanya keterlambatan penerbitan kartu nelayan yang tidak sesuai dengan semestinya yaitu dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan formulir pendaftaran. Menurut ketua KUB Ombak Badabua yaitu Bapak Riski pengurusan kartu nelayan dilakukan secara kolektif melalui KUB tetapi penerbitan kartu nelayan itu tidak serentak dan terkesan ditunda-tunda sehingga membuka peluang terjadinya pungli atau pemberian uang pelicin.

Terkait kegunaan atau kemanfaatan kartu nelayan beberapa nelayan yang telah peneliti wawancarai mengatakan bahwa mereka belum tahu nilai lebih kegunaan dari kartu nelayan tersebut. Mereka belum bisa memanfaatkan kartu nelayan itu sesuai kegunaan atau manfaat kartu nelayan diterbitkan seperti untuk membeli BBM bersubsidi, dan untuk mengajukan permohonan mendapatkan bantuan alat tangkap dari pemerintah.

Dalam permasalahan mengenai kepemilikan kartu nelayan ini DKP Kota Padang mempunyai kendala dalam melakukan sosialisasi mengenai kartu nelayan tersebut. Hal itu disebabkan karena masyarakat nelayan yang selalu sibuk melaut untuk mencari ikan sehingga yang menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh DKP untuk sosialisasi tentang kartu nelayan tidak banyak yang hadir. Akibatnya hal tersebut menyebabkan masih kurangnya pemahaman nelayan tentang pentingnya memiliki dan memanfaatkan kartu nelayan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemberian Kartu Nelayan dalam rangka pemberdayaan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”

B. Identifikasi Masalah

1. Masih banyak nelayan yang belum memiliki kartu nelayan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Pengurusan kartu nelayan yang cukup lama dan tidak transparan.
3. Masih banyak nelayan yang belum mengetahui kegunaan kartu nelayan

4. Masih banyak nelayan yang belum memanfaatkan kartu nelayan sebagaimana mestinya
5. DKP Kota Padang belum optimal melaksanakan sosialisasi tentang kepemilikan dan manfaat kartu nelayan disebabkan kehadiran nelayan pada saat kegiatan sosialisasi sangat sedikit.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka penelitian ini dibatasi dan difokuskan hanya untuk melihat efektivitas program kartu nelayan dalam rangka pemberdayaan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, serta untuk melihat kendala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program kartu nelayan dalam rangka pemberdayaan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam program kartu nelayan untuk pemberdayaan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.?
3. Apa solusi untuk mengatasi kendala dalam program kartu nelayan bagi nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan efektivitas program kartu nelayan dalam rangka pemberdayaan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam program kartu nelayan untuk pemberdayaan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
3. Untuk menjelaskan solusi untuk mengatasi kendala dalam program kartu nelayan bagi nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang,

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan bidang keilmuan dilingkungan jurusan IAN terutama terkait dengan pengembangan mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi nelayan

Agar nelayan mengetahui pentingnya kepemilikan kartu nelayan dan dapat memanfaatkannya sebagaimana mestinya.

- b. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang

Menjadi masukan bagi DKP Kota Padang dalam memberikan sosialisasi kepada para nelayan terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh DKP yang ditujukan untuk nelayan tradisional.

- c. Bagi peneliti

Sebagai latihan membuat karya tulis ilmiah dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan IAN FIS UNP